



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VII DPR RI  
(BIDANG: ENERGI, RISET DAN INOVASI, SERTA INDUSTRI)**

---

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: I
Rapat	: Ke – 17 (Tujuh Belas)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Panja Vale
Dengan	: Sekjen, Plh. Minerba KESDM RI, Gubernur Prov.Sulsel, Gubener Prov. Sulteng dan Gubener Prov. Sultra
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 8 September 2022
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d 13.45 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI Gedung Nusantara I Lantai I, secara tatap muka dan <i>virtual</i>
Acara	: 1. Realisasi kontribusi PT Vale Indonesia, Tbk terhadap pendapatan negara dan daerah 2. Penjelasan terkait yang harus dipenuhi oleh PT Vale Indonesia, Tbk dalam Kontrak Karya termasuk Kontrak Karya Amendemen 3. Lain-lain
Ketua Rapat	: Bambang Haryadi, SE (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI/ F.P. Gerindra)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir	: A. Pemerintah 1. Sekjen 2. Plh. Dirjen Minerba KESDM RI 3. Gubernur Prov. Sulsel 4. Gubernur Prov. Sulteng 5. Gubernur Prov Sultra B. 36 Orang Anggota dari 27 Orang Anggota Komisi VII DPR RI terdiri dari: 9 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadirfisik 6 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir virtual 12 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

## I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Panja Vale Komisi VII DPR RI pada Hari Kamis, 8 2022 dibuka pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh Bambang Haryadi, SE, selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Intern Komisi VII DPR RI dengan acara:
  - a. Realisasi Realisasi kontribusi PT Vale Indonesia, Tbk terhadap pendapatan negara dan daerah
  - b. Penjelasan terkait yang harus dipenuhi oleh PT Vale Indonesia, Tbk dalam Kontrak Karya termasuk Kontrak Karya Amendemen
  - c. Lain-lain

## II. CATATAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Gubernur Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah yang tidak menyetujui adanya perpanjangan Kontrak Karya (KK) PT Vale Indonesia Tbk. Terkait hal tersebut, Komisi VII DPR RI mendesak Sekjen dan PLH Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI untuk melibatkan secara aktif Gubernur Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah dalam proses perpanjangan Kontrak Karya (KK) PT Vale Indonesia Tbk.
2. Komisi VII DPR RI mendorong Sekjen dan PLH Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI agar wilayah Kontrak Karya (KK) PT Vale Indonesia Tbk yang belum termanfaatkan untuk di lakukan *relinquish* (pelepasan) untuk

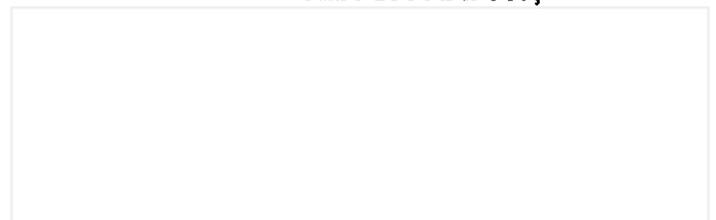
3. Komisi VII DPR RI mendesak Sekjen dan PLH Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI untuk melakukan revisi PP tentang PNBK sector ESDM dengan meningkatkan biaya sewa lahan (*land rent*) dan Royalty dari sektor pertambangan.
4. Komisi VII DPR RI meminta Sekjen Kementerian ESDM RI, PLH Dirjen Minerba KESDM RI, Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Tenggara untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Pimpinan dan Anggota Panja Vale Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 15 September 2022.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 13.45 WIB

Jakarta, 8 September 2022

**KETUA RAPAT,**



**BAMBANG HARYADI, SE**

**A-109**